



EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK: Studi Tentang Gerakan Bela Beli Kulon Progo dan Toko Milik Rakyat dalam Mendorong Perekonomian Lokal di Kabupaten Kulon Progo

Muhammad Mahfud Syaifullah

Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia, Jakarta
mahfudsyiaifullah@gmail.com

Received 25 December 2024; Revised: 2 Januari 2025; Accepted: 2 Januari 2025; Published: Januari 2025; Available online: Januari 2025

ABSTRAK

Ketika terpilih pada Pilkada 2011 di Kabupaten Kulon Progo, Hasto Wardoyo langsung membuat perubahan dengan melahirkan Perda No. 11 Tahun 2011 dan program Gerakan Bela Beli Kulon Progo (GBBKP) untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dasar kebijakan tersebut untuk mengatasi menjamurnya minimarket di Kabupaten Kulon Progo, khususnya yang letaknya strategis dekat dengan pasar tradisional dan memberikan ruang bagi pelaku UMKM dan koperasi-koperasi untuk menghidupkan perekonomian lokal-rakyat dengan menggagas dan implementasikan Toko Milik Rakyat. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, perspektif strukturalis dan pendekatan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dari Fisher *dkk* (2007) tentang *hybrid approach* dalam kebijakan publik dan Kawengian dan Rares (2015) tentang evaluasi kebijakan publik. Adapun hasil penelitian ini mengenai evaluasi kebijakan publik yaitu; kebijakan turunan (Perda No. 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal dan Perkep Dinas KUKM Kabupaten Kulon Progo No. 518/808/IX/2016 tentang NSPK) yang memperkuat kebijakan terlambat terbit yang mengakibatkan proses *take over* toko modern oleh koperasi dilakukan secara bertahap karena menggunakan *hybrid approach*, Tomira sebagai tulang punggung UMKM se Kabupaten Kulon Progo untuk memasarkan produknya tetapi optimalisasi pemberdayaan dan Pengawasan oleh Pemkab Kulon Progo perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem perekonomian lokal yang produktif, kolaboratif dan mandiri.

Kata Kunci: Tomira, Kulon Progo, UMKM, Hasto Wardoyo.

PENDAHULUAN

Pasca reformasi 1998, perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki dampak signifikan dalam pembangunan di Indonesia, khususnya di tingkat lokal. Perubahan ini mengejutkan inti dari esensi demokrasi; dari, oleh dan untuk rakyat dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (M. Soebiantoro, dkk, 2014:94). Di sisi lain, perubahan tatanan sistem dan fungsi tersebut tidak hanya berlaku secara vertikal, melainkan juga horizontal. Jika merujuk pada regulasi mengenai Pemerintah Daerah (UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015) mengamanatkan bahwa berlakunya otonomi daerah ditujukan sebagai sarana dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan efektif dan efisien di multi-sektor (Ragawino, 2003).

Berbagai strategi yang dirancang berdasarkan visi-misi dan program yang telah digaungkan sejak masa pra dan pasca terpilihnya sebagai pemimpin politik, belum tentu sepenuhnya berjalan optimal. Atas dasar tersebut, dibutuhkan *will* dari para pemimpin untuk menciptakan kebijakan publik yang menjadi bentuk nyata dari aktualisasi visi-misi dan program kerja yang relevan terhadap

masalah yang ada di sekitar masyarakat. Pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2011 di Kabupaten Kulon Progo, Bupati Hasto Wardoyo sebagai pemimpin politik terpilih langsung memberikan gebrakan di masa awal kepemimpinannya.

Sesuai data BPS pada tahun 2010 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), angka kemiskinan paling tinggi dengan total 24,8% dari jumlah penduduk 388.869 jiwa terdapat di Kabupaten Kulon Progo (Sutarmi, Jogja Antara News, 2016). Menurut Rijanta (2013) menjelaskan bahwa Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang mengalami kebocoran (Susilo dan Rijanta, 2017). Masih banyak sekali masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang kesejahteraannya masih dibawah rata-rata dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi DIY (Kurniawan, 2015).

Data mengenai ketimpangan sosial dan ekonomi di atas menjadi cermin bahwa pemerintah sebelumnya tidak mengatasi akar permasalahan yang ada di masyarakat. Atas dasar masalah kemiskinan tertinggi di Kabupaten Kulon Progo, Bupati Hasto Wardoyo menggagas Gerakan Bela Beli Kulon Progo (GBBKP) dalam melindungi produk dan pasar di tingkat lokal. Program GBBKP yang telah dimulai sejak tahun 2013

tergolong produktif dalam mengembangkan dan menjaga perekonomian di Kulon Progo. Makna dari Gerakan Bela Beli Kulon Progo (GBBKP) sendiri merupakan strategi merubah kultural secara kognitif yang harus dilakukan oleh masyarakat dengan membeli dan mencintai produk lokal dari Kulon Progo jika ingin membela Kulon Progo (Makmun Hidayat, Cendana News, 2017).

Tujuan awal adanya GBBKP tersebut tentu tidak lepas sebagai strategi pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan. Dengan terdapatnya GBBKP tersebut, merupakan gebrakan riil dari Bupati Hasto Wardoyo dalam merekonstruksi permasalahan yang dihadapi sejak awal era pemerintahannya. Beberapa potensi perekonomian yang berhasil dikembangkan dari GBBKP dan menjadi pemasukan signifikan bagi Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo seperti Air Kulon Progo (AirKu), industri kerajinan batik "Geblek Renteng" dan Toko Milik Rakyat (ToMiRa).

Dalam mengembangkan potensi perekonomian, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Pemkab Kulon Progo) menggandeng atau melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholders seperti koperasi, UMKM dan masyarakat

Kabupaten Kulon Progo. Salah satu realisasi program yang menjadi unggulan dari Pemkab Kulon Progo selama masa kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo adalah Toko Milik Rakyat (ToMiRa).

Tantangan lain yang dihadapi oleh Bupati Hasto Wardoyo adalah menjamurnya toko modern atau minimarket yang ada di sekitar Kabupaten Kulon Progo. Keberadaan toko modern tersebut menjadi ancaman bagi para pelaku UMKM, pedagang pasar dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang berpenghasilan kecil dan lebih beralih membeli kebutuhan di toko modern dengan jaminan produk yang berkualitas, fasilitas yang bagus dan pelayanan yang ramah (Kismini, 2016; Lutfi, 2012; Handoko, 2017). Dalam mengatasi kompetisi pasar tersebut, Pemkab Kulon Progo menciptakan gebrakan yaitu Program GBBKP dan kebijakan publik yang melindungi perekonomian lokal atau rakyat secara rantai ekonominya mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi.

Kebijakan publik yang populis dirancang dan diimplementasikan oleh Pemkab Kulon Progo di masa kepemimpinan politik Bupati Hasto Wardoyo yaitu Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kulon Progo. Orientasi dari kebijakan tersebut untuk mengatasi semakin menjamurnya beberapa toko modern yang berkembang secara pesat khususnya di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, kebijakan disusun dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama yang berkaitan dengan pasar tradisional dan UMKM.

Sebelum peraturan daerah tersebut disahkan, ternyata sudah ada beberapa minimarket atau toko modern yang berdiri dengan jangkauan jarak kurang dari 1000 meter dari pasar tradisional. Lantas dengan adanya pelanggaran peraturan daerah tersebut, pemerintah menindak tegas dengan memberikan opsi kepada pemilik atau pengelola minimarket seperti; tidak diperpanjang izin, ditutup, atau *take over* 'pengambilalihan'. Pilihan tersebut merupakan bagian strategi dari Bupati Hasto Wardoyo dalam merombak total khususnya toko modern yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan upaya untuk mengontrol dan mengambil alih bisnis. Bupati Hasto Wardoyo juga berhasil dalam memberdayakan dan melindungi potensi perekonomian

lokal di masyarakat dengan strategi mengambil alih toko modern dengan melakukan kemitraan bersama koperasi.

Kesepakatan *take over* toko modern tersebut ditandai dengan adanya MoU Nomor: 28/MOU.KP/HKM/2014 antara Pemkab Kulon Progo dengan Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. pada 1 September 2014 dan Nota Kesepahaman Nomor: 46/MOU-KP/HKM/2016 antara Pemkab Kulon Progo dengan Direktur PT Indomarco Prisma pada 28 Agustus 2016 dalam melakukan kerjasama atau kemitraan toko modern dengan perekonomian rakyat di Kabupaten Kulon Progo (Titik M., Hops, 2023). Dengan melibatkan koperasi dalam menggerakkan roda perekonomian lokal, Pemkab Kulon Progo melihat koperasi sebagai lembaga perekonomian masyarakat dengan *spirit cooperative* atau kerjasama yang akan berfokus terhadap perkembangan perekonomian lokal masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Pada dasarnya, koperasi merupakan wujud institusi kolektif yang dibangun untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Koperasi juga memiliki legalitas sebagai badan usaha yang beranggotakan individu dengan asas kekeluargaan dan dibangun secara demokratis, serta memiliki peluang terbuka dalam berkolaborasi (Ningsih, 2016; Mutis, 1992). Sedangkan dalam

perkembangannya, status ToMiRa merupakan aset yang dikelola berdasarkan kemitraan antara pemilik toko modern dan koperasi yang menampung beberapa produk lokal dari UMKM di Kabupaten Kulon Progo (Meita C. Sekar S., 2017:12; Karina dan Kurniawan, 2019).

Sejak berdiri dari tahun 2014, ToMiRa yang merupakan toko modern hasil *take over* dan kerjasama antara koperasi, UMKM di Kabupaten Kulon Progo, dan pemilik toko modern telah menjadi salah satu program andalan GBBKP yang dimulai sejak kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo. Tujuan utama dari pengembangan ToMiRa adalah untuk mengembangkan potensi perekonomian Kulon Progo dari sektor UMKM dan memaksimalkan peran koperasi, serta menciptakan iklim kemandirian ekonomi dengan melindungi produk lokal di Kabupaten Kulon Progo. Berkembangnya ToMiRa mampu menggerakkan perekonomian rakyat dan mendorong beberapa prestasi hasil kinerja kepemimpinan politik Bupati Hasto Wardoyo dalam membangun dan mengembangkan potensi yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo.

Fenomena riil yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo tidak lepas dari proses ataupun tahapan

dari kebijakan publik. Melalui program GBBKP, Bupati Hasto Wardoyo mencoba menata kembali banyak permasalahan multi-dimensi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Pada hakikatnya, kebijakan publik merupakan instrument dari negara melalui pemerintah dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi negaranya. Mengenai tahapan, kebijakan publik tradisional yang dikemukakan oleh Anderson (2003) terdiri atas definisi masalah, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Anderson, 2003). Memahami kebijakan publik juga bisa dilihat dari segi pendekatan yaitu *top-down approach*, *bottom-up approach* dan *hybrid approach* (Fisher, Sidney dan Miller, 2007). Di sisi lain, keberadaan kebijakan publik, dalam hal ini program GBBKP merupakan *legacy* bagi Bupati Hasto Wardoyo dalam menciptakan produk politiknya.

Jika merujuk pada permasalahan di atas, maka lebih tepat penelitian ini berfokus pada tahapan evaluasi kebijakan. Secara definitif, evaluasi merupakan langkah yang diambil untuk menilai atau merefleksikan suatu 'produk' kebijakan publik dalam aspek substansi, implementasi dan dampaknya (Achyar, dkk, 2017:112). Di sisi lain, evaluasi kebijakan publik juga bersifat fungsional. Dalam arti ini,

evaluasi kebijakan publik sejatinya tidak hanya diproses akhir, melainkan juga terdapat dalam seluruh proses dari formulasi dan implementasi. Korelasi dari setiap tahapan menjadi inti dari fungsionalisasi dari evaluasi kebijakan dalam mengamati dan menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan.

Anderson (2003) menjelaskan evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat (dampak) dari kebijakan (Kusumanegara, 2010:121). Pandangan lain mengenai evaluasi kebijakan publik dari Kawengian dan Rares (2015) menyatakan evaluasi merupakan aktivitas yang dirancang untuk menilai atau mengukur manfaat dari suatu kebijakan atau program-program pemerintah yang dilaksanakan melalui sub-kebijakan yang lebih spesifik (Kawengian dan Rares, 2015:3). Terdapat enam langkah yang dalam melakukan evaluasi kebijakan menurut Edward A. Suchman, yaitu (Winarno, 2002:169):

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
2. Analisis terhadap masalah;
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan;
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi;

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain; dan
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Apabila ternyata indikator dari yang ditetapkan tidak dijalankan, maka kebijakan publik berpotensi gagal. Rekomendasi kebijakan hasil dari evaluasi kebijakan merupakan tindak lanjut secara konstruktif dalam merancang kebijakan baru yang jauh lebih efisien dan efektif. Evaluasi kebijakan harus mendorong adanya objektivitas dari aktualisasi kebijakan publik. Jika terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang menuai kegagalan, maka kebijakan tersebut harus segera di-rekonstruksi, karena hal ini akan berdampak secara luas atau *domino effect* ke pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivis dan perspektif strukturalis. Dalam hal ini, paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang menempatkan posisi peneliti setara dan sebisa mungkin masuk dengan subjeknya serta berusaha memahami dan mengonstruksikan sesuatu yang menjadi pemahaman subjek yang

akan diteliti (Effendy dan O. Uchjana, 1989:24). Sedangkan, perspektif strukturalisme dapat dipahami sebagai sebuah usaha menemukan struktur umum yang terdapat dalam aktifitas manusia (G. Ritzer, 2010:51).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan penelitian berkaitan dengan 'How' atau 'Why', bila peneliti hanya mempunyai sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam kehidupan nyata. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

PEMBAHASAN

Dinamika Perekonomian Lokal melalui Gerakan Bela Beli Kulon Progodan Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulon Progo

Tantangan awal yang harus Bupati Hasto Wardoyo hadapi ialah masalah kemiskinan. Bupati Hasto Wardoyo setelah terpilih pada tahun 2011 langsung menekan atau melegitimasi peraturan daerah yang bertujuan dalam melindungi perekonomian lokal masyarakat. Bupati Hasto Wardoyo membuat sebuah

gebrakan yang dinamakan Gerakan Bela Beli Kulon Progo (GBBKP). Pertama kali program GBBKP diluncurkan pada tanggal 25 Maret 2013 di Alun-Alun Wates Kabupaten Kulon Progo. Dengan melalui ikrar atau semboyan dari GBBKP yang berarti semangat kemajuan menghadapi persaingan global dengan merebut pasar di negeri sendiri (Bagus Kurniawan, News Detik, 2013).

Bukan hanya sekedar program yang dimaksud oleh Bupati Hasto, melainkan juga sebagai gerakan ideologis dalam membangun kemandirian bangsa secara ekonomi dengan membeli dan membela produk sendiri yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Contoh saja, pertama yang dahulu pernah menjadi fokus setelah dicetuskan program GBBKP ialah memproduksi Batik Geblek Renteng.

Selain batik, kemudian Bupati Hasto Wardoyo juga menciptakan beras lokal yang dinamakan Beras-Ku dan Air-Ku yang merupakan sumber daya alam yang sangat potensial dikelola oleh PDAM Kulon Progo. Dalam bidang pertanian, GBBKP menghasilkan Beras-Ku yang dimana merupakan hasil dari kerja kolektif Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) se-Kabupaten Kulon Progo. Tidak hanya sebagai gerakan dalam membangun perekonomian mandiri di Kabupaten Kulon

Progo, GBBKP juga menghadirkan filosofi tentang menjaga ketahanan finansial atau perputaran uang di ranah domestik agar tidak lari keluar wilayah.

Salah satu program unggulan yang mengantarkan Kabupaten Kulon Progo dikenal oleh publik pada saat kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo ialah Toko Milik Rakyat (ToMiRa). Program tersebut telah menciptakan kemandirian ekonomi dengan melahirkan pasar di tingkat lokal hasil perkawinan atau *take over* antara koperasi dengan toko modern di Kabupaten Kulon Progo. Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bentuk dari kebijakan yang mendukung perekonomian lokal khususnya menghadirkan ToMiRa sebagai resolusi atas maraknya toko modern di Kabupaten Kulon Progo dan keberpihakan kepada pegiat UMKM dan koperasi di awal kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo pada periode pertama.

Asal-usul ToMiRa juga tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah, UMKM, koperasi, dan perwakilan elemen masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dalam merumuskan berdiri dan berkembangnya ToMiRa. Bupati Hasto Wardoyo meyakini bahwa ToMiRa merupakan model pengelolaan pasar yang produktif

dan kolaboratif karena disertai dengan spirit kemandirian khususnya dalam membangun perekonomian lokal, apalagi sasaran beliau terdampak ke masyarakat di kalangan bawah.

Dalam prosesnya, Bupati Hasto Wardoyo akhirnya menggelar musyawarah dan membuat kesepakatan kepada pemilik toko modern di Kabupaten Kulon Progo untuk bekerjasama melalui kemitraan yang saling menguntungkan antara Koperasi dan UMKM. Pertemuan tersebut melahirkan beberapa kesepakatan, sebagai berikut (PPKL Kulon Progo, 2017):

1. Gerai yang melanggar dibeli dengan mekanisme *take over* oleh koperasi;
2. Cara pembelian dengan mengansur dari omset penjualan;
3. Omset penjualan setelah dikurangi biaya operasional dan anggaran maka sisanya menjadi surplus atau keuntungan koperasi;
4. ToMiRa ini menjadi milik koperasi dan berkewajiban menyediakan tempat bagi produk lokal minimal 20%;
5. Koperasi berkewajiban mendorong dan memfasilitasi produk lokal anggota atau masyarakat agar masuk ke ToMiRa;
6. Alfamart atau Indomart berkewajiban memberikan pendampingan kepada koperasi seperti alih pengetahuan, mendorong terjadinya hubungan saling

membutuhkan, saling
menguntungkan, saling
mempercayai, saling
memperkuat, dan disertai
bantuan serta perkuatan.

Sedangkan filosofi yang berkaitan antara GBBKP dengan ToMiRa adalah meminimalisir adanya ketimpangan ekonomi dan merawat kebersamaan antar masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Setelah berkembang dan pertama kali diresmikan sejak tahun 2014 melalui MoU/Nota Kesepahaman Nomor: 28/MOU.KP/HKM/2014 antara Pemkab Kulon Progo dengan PT Sumber Alfaria Trijaya langsung membentuk *pilot project* ToMiRa dengan melibatkan 3 koperasi yaitu Kopaneka, Koperasi Bima, dan Koperasi BMT Giri Makmur. Pembentukan ToMiRa yang tidak lepas dari peran Dinas KUKM Kab. Kulon Progo dalam mendampingi proses *take over* toko modern berjejaring ke pihak koperasi dilakukan secara bertahap.

Dalam perkembangannya, ToMiRa sesuai di *take over* dan dikembangkan oleh koperasi, diberikan otoritas penuh untuk mengurus dan mengontrol arus distribusi atau pemasokan barang. Hal itu juga tidak lepas dari komitmen atau kesepakatan melalui nota kesepahaman dan Peraturan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (KUKM) No. 518/808/IX/2016

Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulon Progo yang menjadi landasan operasional ToMiRa di Kabupaten Kulon Progo. Fungsi koperasi semakin bertambah dengan mengontrol dan menambah jumlah sesuai target produk UMKM dari kesepakatan yang berlaku.

Bupati Hasto Wardoyo melibatkan koperasi dalam bermitra dengan ToMiRa untuk *me-rebranding* pandangan dari masyarakat bahwa koperasi merupakan lembaga kolektif yang dimiliki oleh masyarakat, memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian lokal dengan spirit gotong royong, dan semakin terbuka terhadap perubahan zaman, khususnya persaingan di perekonomian lokal yang semakin kompetitif dengan memperkuat prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam bahu-membahu menjaga dan mengembangkan potensi perekonomian.

Dengan konsep yang sangat visioner tersebut, ToMiRa bukan hanya sebatas ruang dalam mengenalkan ideologi Ekonomi Pancasila melalui GBBKP dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk UMKM atau perekonomian lokal, melainkan juga merubah mindset wilayah dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo secara menyeluruh yang

mulai dikenal oleh publik secara luas.

Evaluasi Kebijakan Mendorong Perekonomian Lokal melalui GBBKP dan ToMiRa di Kabupaten Kulon Progo

Berawal dari GBBKP yang dicetuskan sejak awal kepemimpinannya pada tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2013, Bupati Hasto Wardoyo setelah resmi menjabat di periode pertama langsung membuat sebuah kebijakan pro-rakyat yaitu Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain Perda tersebut yang menjadi cikal-bakal terwujudnya ToMiRa yang dilandasi oleh program GBBKP, Bupati Hasto Wardoyo memiliki tantangan berat dalam merubah pola pikir atau mindset sebagai pemimpin politik ke masyarakat.

Pengaruh yang diberikan saat Bupati Hasto Wardoyo berkuasa sebagai Bupati Kulon Progo merupakan wujud dari kepemimpinan politik yang menjadi aktor sekaligus pelopor dari setiap strategis dalam merancang, menciptakan, mengarahkan, dan mengevaluasi dari setiap perubahan yang terjadi saat menjadi pemimpin politik di masyarakat. Di sisi lain, dalam ranah birokrasi, Bupati Hasto Wardoyo juga intens dalam memantau dan mengontrol kinerja birokrasi dengan memberikan kemandirian dan inovasi dari setiap program

pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat Kulon Progo.

Keberpihakan Bupati Hasto Wardoyo secara politis bisa dilihat dari setiap keputusan dalam melibatkan masyarakat khususnya kalangan bahwa untuk dapat memastikan perlindungan hukum berupa kebijakan-kebijakan populis selama masa kepemimpinannya. Seperti dinamika perkembangan ToMiRa, Bupati Hasto Wardoyo selalu memberikan peringatan kepada para investor di Kabupaten Kulon Progo yang tidak tertib atau patuh terhadap kebijakan yang dibuat semasa kepemimpinannya. Hal itu terbukti dalam beberapa pasal di Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 14 ayat c: "Toko Modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 meter (seribu meter) dengan Pasar Tradisional"

Sehingga, keputusan secara politis yang dibuat oleh Bupati Hasto Wardoyo memiliki keberpihakan terhadap kondisi perekonomian rakyat. Khususnya, melindungi pasar tradisional dari persaingan toko modern dan produktifitas UMKM yang sangat potensial di Kabupaten Kulon Progo. Keputusan tersebut untuk memajukan perekonomian masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang para

periode sebelumnya dikenal sebagai daerah yang sangat tertinggal secara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan toko modern yang sangat signifikan di Kabupaten Kulon Progo.

Selanjutnya, pada tahun yang sama yaitu 2016, terdapat kebijakan baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Produk Lokal dan Peraturan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (KUKM) No. 518/808/IX/2016 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Toko Milik Rakyat (ToMiRa) di Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan tersebut merupakan produk hukum terakhir yang dibuat pada masa periode pertama kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo di Kabupaten Kulon Progo.

Beberapa kebijakan populis yang dikeluarkan oleh Bupati Hasto Wardoyo bukan hanya mengindikasikan bahwa dirinya merupakan pemimpin populis yang selalu dekat dengan rakyat. Dari kebijakan populis yang dikeluarkan, khususnya pada masa awal dan akhir kepemimpinan periode pertama, merupakan bagian dari strategi Bupati Hasto Wardoyo dalam mengamankan posisinya sebagai Bupati Kulon Progo dalam merealisasikan program-program kerakyatan, khususnya yang

bersentuhan langsung seperti bidang sosial dan ekonomi.

Kemandirian ekonomi yang menjadi spirit dari Bupati Hasto Wardoyo tercermin dalam kebijakan yang dibuat. Walaupun, di sisi lain, evaluasi dari kebijakan tersebut berjalan alot atau tidak segera di-implementasikan karena ada konflik kepentingan dengan pengusaha minimarket di Kabupaten Kulon Progo. Konsep GBBKP yang sangat ideologis menjadi kendala bagi masyarakat dalam menginterpretasikan perubahan secara mindset, hal itu juga berlaku di jajaran birokrasi di Kulon Progo yang terkena dampak dari kebijakan tersebut.

Bupati Hasto Wardoyo menegaskan bahwa program GBBKP dan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bentuk dari kebijakan yang mendukung perekonomian lokal khususnya menghadirkan ToMiRa sebagai resolusi atas maraknya toko modern di Kabupaten Kulon Progo dan keberpihakan kepada pegiat UMKM dan koperasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bupati Hasto Wardoyo:

“Kalau Perda harus saya sepakati dibuat dahulu. Jadi, legalnya itu di tahun 2011 akhir, dan kita buat lagi perlindungan produk lokal tahun 2016. Memang, Perda tersebut dikatakan telat, tetapi tidak ada salahnya setelah kita menyediakan pasar seperti TOMIRA, kita juga

harus memberikan kekuatan dalam bentuk Perda ke pelaku UMKM. Spirit kemandirian, ekonomi Pancasila yang bersifat kekeluargaan, kita juga ajak pemodal dan proletar dipertemukan. Jadi antara pemodal yang memiliki kekuatan kapital atau sumber materiil dan proletar masyarakat yang tidak memiliki sumber daya seperti pemodal. Intinya, pemodal tidak boleh menjadi pemilik, dan penghasilannya tetap harus diterima oleh rakyat.” (wawancara bersama Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo)

Dalam prosesnya, Perda tersebut tidak serta merta langsung mengambilalih beberapa toko modern yang melanggar pasal 14 ayat c mengenai indikasi adanya pelanggaran zonasi antar toko modern dengan pasar tradisional. Seperti yang dinyatakan secara singkat oleh Nurhadi mengenai awal berdirinya ToMiRa di Kabupaten Kulon Progo:

“Sebelum adanya Perda, toko modern sudah banyak. Diluar dari Perda saja sekitar ada 15 toko modern yang belum di take over. Awalnya 3, 4, 4, dan mulai tahun 2016 itu sudah sampai 16 atau tambah 4, dan sekarang 2019 sudah genap 18 TOMIRA. Sebenarnya juga ada beberapa TOMIRA yang sudah tutup, totalnya 3, karena tidak diperpanjang izin tempatnya oleh Dinas Perdagangan, kemungkinan total misalnya enggak ada yang tutup ada sekitar 21 toko.” (wawancara dengan Nurhadi, staff Dinas KUKM Kulon Progo)

Melihat dengan adanya kecanggihan yang dimiliki secara sistem oleh toko modern tidak membuat Bupati Hasto surut

dalam menegakkan GBBKP sebagai program kemandirian dalam memajukan potensi di sektor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kulon Progo. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri H. selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut:

“Filosofinya adalah bagaimana menghadirkan yang kaya untuk menghidupkan yang miskin. Kita tidak bisa melawan teknologi, tapi harus dengan ideologi. Teknologi ya itu tadi, perusahaan toko modern sudah punya sistem. Sementara koperasi jika dibiarkan membuka toko sendiri, mereka tidak punya jaringan pasokan produk yang sudah tersistem dan sistem kerjasama yang sudah kokoh. Menurut, Bupati Hasto sesuai gagasan yang saya ketahui, Ekonomi Pancasila tidak mengenal tantangan atau persaingan yang adalah bukan bersaing, tapi bersanding. Maka disitulah adanya kapitalis dengan proletar, representasi proletar itu sendiri ialah koperasi yang dimana berisi orang miskin utk menghadapi pemodal. Disitulah konsep Gotong Royong yang kuat membantu yang lemah. TOMIRA berpihak kepada ekonomi kerakyatan dan ini adalah upaya mewujudkan Ekonomi Pancasila melalui TOMIRA di Kab. Kulon Progo.” (wawancara dengan Ibu Sri H., Kepala Dinas KUKM Kulon Progo)

Dari sudut pandang pelaku UMKM, Ibu Marwiyah juga sangat terbantu sekali dengan hadirnya ToMiRa di Kabupaten Kulon Progo. Karena, produk Kopi Moka Menoreh yang diolahnya semakin menemukan pasar yang potensial dan strategis.

Apalagi semakin dikenal oleh masyarakat Kulon Progo dan beberapa masyarakat yang dari luar sedang berkunjung ke Kabupaten Kulon Progo.

Selain itu, Bupati Hasto juga sangat inovatif sekali dalam manajemen secara fungsi birokrasi dengan memberikan otonomi dan tanggung jawab terhadap program GBBKP yang sedang dikembangkannya melalui ToMiRa. Jadi, dengan adanya kolaborasi kedua instansi seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo, sangat memudahkan sekali dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat khususnya menghasilkan produk yang bisa dipasarkan melalui ToMiRa. Hal tersebut bisa dilihat dalam pernyataan, sebagai berikut:

“Menurut saya, itu sangat mempermudah sekali jalur pemasaran dan pembentukan jaringan. Karena, dengan GBBKP dan sistem perubahan kerjasama yang diberlakukan oleh pemilik Indomaret atau Alfamart masih ujicoba. Semuanya produk juga berjalan bareng masuk ke TOMIRA. Bupati Hasto juga cukup bijaksana, dari Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perdagangan diberikan wewenang memberdayakan UMKM. Fungsi kedua dinas itu untuk memantau perkembangan UMKM mulai dari tahap prosedur produknya dan sampai pemasaran ke TOMIRA. Semiminal mungkin setiap produk UMKM ada P-IRT dan SIUP. Bahkan, kedua dinas tersebut sangat

menyanggupi sekali untuk memfasilitasi produk UMKM yang akan di *supply* ke TOMIRA. Menurut saya, dengan adanya TOMIRA sangat membantu sekali mengenalkan lebih dari produk kopi Moka yang saya *supply* di TOMIRA.” (wawancara bersama Marwiyah, pelaku UMKM Kopi Menoreh)

Benang merah dari konsep GBBKP dan ToMiRa seperti yang dijelaskan oleh Bupati Hasto, sebagai berikut:

“Garis besarnya, TOMIRA merupakan daun dan ranting dalam wujud kemandirian ekonomi. Ideologi seperti pohon yang tumbuh subur. Tinggal bagaimana diri kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda.”

Program GBBKP bisa dikategorikan sebagai salah satu langkah pasti berawal dari ideologis kemandirian dalam membangun daerah khususnya dalam ranah perekonomian. Ide tentang GBBKP yang dimana merupakan adopsi dari kata “Bela” yang dicetuskan saat pertemuan para elit politik, membuat Bupati Hasto mereformulasi konsep tersebut sesuai dengan keadaan di Kabupaten Kulon Progo. Dengan menciptakan program yang sangat sederhana melalui GBBKP harapan dari Bupati Hasto Wardoyo, masyarakat Kulon Progo dapat bergotong-royong mewujudkan perekonomian melalui prinsip kemandirian dengan memaksimalkan potensi SDA dan SDM yang ada di Kabupaten Kulon Progo. GBBKP

bisa diartikan sebagai bentuk dari konsep ekonomi secara gotong royong yang sangat demokratis, karena rakyat memiliki peran dan ikut andil dalam menciptakan perkembangan ekonomi.

Dalam memahami evaluasi kebijakan publik dari ToMiRa di masa kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo, maka bisa ditinjau dari Indeks Garis Kemiskinan (IGK) yang mengalami penurunan, yaitu: pada tahun 2011 IGK berada di angka 23,62 persen, sedangkan di tahun 2016 (akhir periode pertama) sebesar 20,30 persen dan turun di tahun 2017 menjadi 20,03 persen. Penurunan IGK di Kabupaten Kulon Progo tentu tidak lepas dari produk politik 'kebijakan' semasa kepemimpinan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo terutama yang memberikan perhatian pada ekosistem perekonomian lokal.

Gagasan tentang kemandirian ekonomi yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan secara realistis mengambilalih minimarket yang berbenturan dengan ketentuan dalam kebijakan adalah keberanian sebagai pemimpin politik. Apalagi, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo juga memiliki keberpihakan terhadap kondisi perekonomian lokal di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, secara paradigma dari GBBKP yang dicetuskan oleh Bupati Kulon Progo mencoba untuk memproteksi perekonomian lokal di tengah kompetisi global yang kian pesat dan kompetitif.

Keberadaan Tomira juga berhasil memberikan ruang akselerasi dalam mendistribusikan produk lokal UMKM di Kabupaten Kulon Progo, serta memberikan kesempatan kolaborasi dengan menggerakkan koperasi-koperasi untuk mengambilalih minimarket yang diatur dalam kebijakan tersebut.

Sisi evaluasi dari kebijakan tersebut tidak lepas dari implementasinya yang berjalan secara bertahap. Di sisi lain, tarik-ulur kepentingan juga tidak lepas dalam memahami tujuan dari kebijakan tersebut, terutama antara pemerintah dengan kebijakan pro-rakyat melawan investor yang memiliki kepentingan ekonomi. Anggota DPRD Kab. Kulon Progo turut memberikan perhatian pada evaluasi kebijakan tentang ToMiRa tersebut bahwa Pemkab Kulon Progo harus kembali meninjau ulang 22 titik ToMiRa yang sepenuhnya belum berpihak kepada pelaku UMKM dan masyarakat Kab. Kulon Progo (Sutarmi, Antara News, 2021). Tanggapan tersebut menjadi cermin bahwa kebijakan mengenai ToMiRa selain membuka kran investasi toko modern, tetapi juga menjadi kompetitor bagi toko kelontong milik rakyat yang lokasinya berdekatan dengan ToMiRa.

KESIMPULAN

Pilkada Kulon Progo tahun 2011 telah membawa pendatang baru yaitu Hasto Wardoyo yang terpilih sebagai Bupati Kulon Progo dan terpilih kembali pada tahun 2017. Melalui program Gerakan Bela Beli Kulon Progo (GBBKP) yang diluncurkan sejak tahun 2013, membawa Bupati Hasto Wardoyo merubah tatanan dan permasalahan yang ada di Kab. Kulon Progo, terutama sektor ekonomi. Merebaknya permasalahan toko modern atau minimarket berjejaring di Kabupaten Kulon Progo menjadi persoalan yang dihadapi oleh Bupati Hasto Wardoyo melalui kebijakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kulon Progo, spesifik pada pasal 14 ayat c yang mengatur tentang zonasi antara toko modern yang berada di sekitar pasar tradisional.

Evaluasi dari kebijakan yang diterbitkan sepanjang masa kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo di Kabupaten Kulon Progo telah meningkatkan perekonomian dan menurunkan Indeks Garis Kemiskinan yang awalnya di tahun 2011 berada di angka 23,62 persen menjadi 20,03 persen di tahun 2017. Selain itu, tarik-ulur kepentingan dalam implementasi kebijakan juga menjadi persoalan bahwa

pemerintah melalui pendekatan *hybrid approach* tengah berupaya melindungi perekonomian lokal di tengah kompetisi perekonomian nasional dan global. Kebijakan pro-rakyat ini memang belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil, tetapi evaluasi riil dari kebijakan tersebut juga dilihat efektivitas ToMiRa sudah menjadi tulang punggung bagi pelaku UMKM dan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dalam menghidupkan perekonomian rakyat atau bahkan menjadi celah bagi investor dalam membangun toko modern yang harus tunduk pada kebijakan pemerintah tersebut.

Masalah lain dari evaluasi kebijakan tersebut, pemerintah belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap produk UMKM yang ada di ToMiRa dan mengupayakan pemberdayaan secara produktif dari produk UMKM dan menstimulasi koperasi di Kabupaten Kulon Progo dalam mendorong terciptanya ekosistem dalam ToMiRa. Selain itu, mengenai tentang proses dari sebuah kebijakan juga terlihat dari adanya jangka waktu yang lumayan panjang dalam implementasi kebijakan. Tentu hal ini tidak lepas dari tarik-ulur kepentingan antara *stakeholders*, terutama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memastikan dan melindungi kemandirian perekonomian lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2003). *Public Policy Making: an Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company. Chapter 1.
- Afandi, Helmi. (2018, Mei 18). *Keren Ekonomi Kerakyatan ala Kulon Progo Diakui Dunia*. Diakses dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/regional/read/3528723/keren-ekonomi-kerakyatan-ala-kulon-progo-diakui-dunia>
- Effendy & Uchjana, Onong. (1989). *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar.
- Firmanto, Danang. (2017, Maret 3). *Tempo Beri Penghargaan 10 Kepala Daerah Teladan 2017*. Diakses dari Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/852419/tempo-beri-penghargaan-10-kepala-daerah-teladan-2017>
- Fischer, Frank., Miller, Gerald J. dan Sidney, Mara S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods*. London dan New York: CRC Press.
- Flo Jpnn. (2016, Agustus 15). *Dapat Tanda Kehormatan dari Presiden Ini Mimpi Hasto Untuk Kulon Progo*. Diakses dari Jpnn: <https://www.jpnn.com/news/dapat-tanda-kehormatan-dari-presiden-ini-mimpi-hasto-untuk-kulon-progo>
- Handoko, Hani T and Rostini R. (2017). *Kasus-kasus Manajemen Perusahaan Indonesia Seri 3*. Yogyakarta: UGM Press
- Hidayat, Makmun. (2017). *Kisah Hasto Wardoyo Membangun Kulon Progo Dengan Tiga Bekal*. Diakses dari Cendana News: <https://www.cendananews.com/2017/12/kisah-hasto-wardoyo-membangun-kulon-progo-dengan-tiga-bekal.html>
- Humas Menpan. (2019). *Tomira dari Kulon Progo untuk Indonesia*. Diakses dari Menpan: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/tomira-dari-kulon-progo-untuk-indonesia-2>
- Karina dan Kurniawan, A. (2019). Analisis Keterkaitan Distribusi Spasial Tomira dengan Komoditas Unggulan Daerah. *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 8, No. 3.
- Kawengian, Debby D. V dan Rares, Joyce Jacinta. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Acta Diurna*, Vol. 4, No. 5.
- Kismini, Elly., dkk. (2016). Peran Paguyuban Pedagang Lokal Sekaran dalam Memperkuat Ekonomi Kerakyatan di Kelurahan Sekaran Kota

*Muhammad Mahfud Syaifullah :EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK: Studi
Tentang Gerakan Bela Beli Kulon Progo dan Toko Milik Rakyat dalam Mendorong
Perekonomian Lokal di Kabupaten Kulon Progo*

- Semarang. *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 43, No. 1.
- Kuntadi. (2016). *Hasto Raih Penghargaan Beli Indonesia Award*. Diakses dari Koran Sindo: http://koran-sindo.com/page/news/2016-10-08/5/70/Hasto_Raih_Penghargaan_Beli_Indonesia_Award
- Kurniawan, Bagus. (2015, Desember 22). *Bela Beli Kulon Progo Spirit dan Sukses Bupati Hasto Angkat Produk Lokal*. Diakses dari Detik: <https://news.detik.com/berita/d-3102031/bela-beli-kulonprogo-spirit-dan-sukses-bupati-hasto-angkat-produk-lokal>
- Laporan PILKADA Kulon Progo Tahun 2011, KPUD Kulon Progo.
- Laporan PILKADA Kulon Progo Tahun 2016, KPUD Kulon Progo.
- Lufti, O. L. (2012). *Dampak Keberadaan Indomaret Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tradisional di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan*. *Welfare State*, Vol. 2, No. 1.
- Mutis, Thobi. (1992). *Demokrasi Ekonomi melalui Koperasi*. Peninjau.
- Ningsih, L. A. (2016). *Peran Koperasi Konsumsi Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Setempat (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir)*. Doctoral Dissertation: UIN Raden Fatah Palembang.
- Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan. (2017). *Toko Modern dimusuhi, ToMiRa solusinya*. Diakses dari PPKL Kulon Progo DIY: <https://ppklkulonprogodiy.com/2017/03/sinovik-2017-toko-moderen-dimusuhi>
- Ragawino, B. (2003). *Desentralisasi dalam Kerangka Otonomi Daerah di Indonesia*. Makalah. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
- Ritzer, George. (2010). *Teori Sosial Postmodern* (terj. Muhammad Taufik). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sari, Meita Candra Sekar. (2017). *Kemitraan ToMiRa di Kulon Progo*. Skripsi. Yogyakarta: UGM Press, 2017. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=130315&obyek_id=4
- Soebiantoro, M. & Kusumanegara, Salahuddin, dkk. (2014). *Pengantar Ilmu Politik*.

- Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Susilo, E. G. B., & Rijanta. (2017). Kajian Implementasi “Bela-Beli Kulon Progo” (Studi Kasus: Air-KU, Batik Geblek Renteng, dan ToMiRa. *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 6, No. 3.
- Sutarmi. (2016, Desember 5). *Angka Kemiskinan di Kulon Progo Turun*. Diakses dari Antara News Jogja: <https://jogja.antaranews.com/berita/343715/angka-kemiskinan-di-kulon-progo-turun>
- Sutarmi. (2021, Maret 26). *Pemkab Kulon Progo Diminta Tinjau Ulang Pendirian 22 Tomira*. Diakses dari Antara News: <https://www.antaranews.com/berita/2065486/pemkab-kulon-progo-diminta-tinjau-ulang-pendirian-22-toko-milik-rakyat>
- Titik, M. (2023, Juli 3). *Alfamart dan Indomaret di Kulon Progo Pakai Nama Tomira, kok bisa? Begini Asal Mulanya*. Diakses dari Hops: <https://www.hops.id/trending/2949344080/alfamart-dan-indomaret-di-kulon-progo-pakai-nama-tomira-kok-bisa-begini-asal-mulanya>
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.